

BAB II

KAJIAN LITERATUR KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

2.1 Kajian Literatur

Kajian literatur adalah kajian terhadap berbagai teori/literatur sebagai landasan pengetahuan dalam menyusun penelitian. Kajian literatur ini dikaji dari berbagai sumber buku teks, jurnal, makalah, laporan penelitian dan lain-lain.

2.1.1 Pembangunan Wilayah

Teori-teori pembangunan memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari "*transisi orisinal*". Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Syamsul, 2005).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk

menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho, 2004).

2.1.2 Ketimpangan Pembangunan

Menurut Kuncoro (2006), kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment factor*). Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Sjafrizal, 2008).

Ekonomi merupakan system kegiatan manusia yang berkaitan dengan distribusi, konsumsi dan pertukaran barang dan jasa ataupun upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai tingkat kemakmuran hidup. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Oikos" yang artinya adalah keluarga atau rumah dan "Nomos" artinya adalah peraturan atau hukum. Sehingga secara garis besar dapat diartikan sebagai suatu "manajemen rumah tangga".

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat

pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai *Hipotesa Neo-Klasik* (Sjafrizal, 2008).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik dalam Sjafrizal (2008), pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf u terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasi secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2008).

2.1.3 Ukuran Ketimpangan Antar Wilayah

Ukuran ketimpangan antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah *Williamson Index* yang digunakan dalam studi Jeffrey G Williamson pada tahun 1966. Istilah *Williamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G Williamson yang mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai kelemahan yaitu sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berbeda dengan *Gini Rasio* yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan, *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Karena yang dibandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok (Sjafrizal, 2008).

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

Contohnya adalah Minyak dan gas alam, batubara, tingkat kesuburan lahan.

2. Perbedaan kondisi demografis

Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Contohnya adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

Contohnya adalah terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batubara dan bahan mineral lainnya. Terdapat lahan yang subur juga turut mempengaruhi, khususnya menyangkut pertumbuhan kegiatan pertanian. Meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah.

5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investai akan cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa suatu perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Berikut ini faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Sumber daya alam yang tersedia
2. Modal untuk pengelolaan sumber daya alam yang tersedia
3. Sarana dan prasarana yang menunjang

Menurut Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa

dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Dalam hal ini berkaitan dengan output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, kenaikan output perkapita harus dianalisis dengan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di pihak lain, pertumbuhan ekonomi mencakup GDP total dan pertumbuhan penduduk.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Sukirno, 2004). Pertumbuhan ekonomi dapat mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam kehidupan masyarakat, sehingga penting untuk melakukan penghitungan pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk menghitungnya adalah dengan menghitung nilai uang. Nilai uang tersebut terdapat pada produk domestik bruto (PDB).

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) yang memiliki arti sebagai besarnya nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki sedikit perbedaan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDB) diperuntukkan untuk menghitung pendapatan nasional, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperuntukkan untuk skala daerah, sehingga PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Keduanya menjadi indikator utama dalam menilai produktif suatu negara dan daerah serta kesejahteraan dalam suatu negara atau daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar (Adisasmita, 2005).

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB memiliki manfaat sangat banyak dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi wilayah. Beberapa manfaatnya antara lain sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita, kemakmuran, kenaikan dan penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan deflasi, menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, tetapi juga menggambarkan perekonomian dimasa lalu dan kemungkinan-kemungkinan prediksi perubahan dimasa yang akan datang (Muta'ali, 2015).

Menurut dokumen statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) perhitungan PDB dan PDRB secara konseptual menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah bruto dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit dalam penyajian ini di kelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor), yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan

Kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.

2. Pertambangan dan penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu : pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

3. Industri pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru.

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan.

6. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.

7. Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

8. Transportasi dan pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.

10. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

12. Real Estate

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak.

13. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan.

15. Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.

17. Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lainlain.

2) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran didapatkan dari nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha yang sidatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha (Bunga neto, sewa tanah, dan keuntungan) tidak diperhitungkan.

3) Pendekatan Pendapatan

PDB dan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksudkan adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

2.1.7 Teori Indeks Pemerataan Koefisien Variasi (KV)

Teknik pengukuran distribusi keragaman (variasi) dapat dilakukan dengan mengukur varian dan standart deviasi dan rata-rata. Standar deviasi (simpangan baku) merupakan akarkuadrat dari varian. Jika semakin mendekati nilai rata-rata berarti terdapat pemerataan, sebaliknya jika nilai standar deviasi semakin besar maka perbedaan semakin besar. Perbandingan antar nilai standar deviasi dan rata-rata ini disebut dengan koefisien variasi. (Muta'ali, 2015)

Penggunaan koefisien variasi dalam mengukur pemerataan hasil-hasil pembangunan sangat bermanfaat. Beberapa indikator tingkat perkembangan wilayah seperti PDRB, PDDR/B/Kapita, Jumlah Penduduk, Luas lahan terbangun dan sebagainya yang dinilai koefisien variasinya dapat menggambarkan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

$$KV = \text{Stdev}/X$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

KV = Indikator pemerataan untuk setiap wilayah di Kabupaten

Stev = Standar deviasi dari indikator yang diamati, misalnya PDRB untuk setiap wilayah

X = Rata-rata nilai dari indikator yang diamati (rata-rata PDRB) untuk setiap wilayah

$$\text{Stdev} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

x_i = Nilai indikator masing-masing wilayah

\bar{x} = Rata-rata nilai dari indikator

n = Jumlah wilayah

Koefisien Variasi yang mendekati nol menunjukkan indikasi semakin meratanya pembangunan suatu wilayah berdasarkan aspek yang diamati dan demikian sebaliknya.

2.1.8 Teori Indeks Keseimbangan Pertumbuhan Antar Sektor (Sj)

Solow dan Samuelson mengembangkan *model balanced growth under constant return to scale* yang pada dasarnya ingin menentukan keseimbangan pertumbuhan wilayah yang dihasilkan dari produksi sektor-sektor di dalamnya. Dalam perhitungan PDRB mendasarkan pada produksi, komponen pertumbuhan wilayah ditentukan oleh pertumbuhan produksi dan kontribusi sektor-sektor didalamnya. Model ini digunakan untuk menganalisis masalah perbedaan pertumbuhan antar sektor terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata suatu daerah dalam periode tertentu. Sehingga, pada tahap selanjutnya akan diperoleh gambaran keseimbangan pertumbuhan pada suatu daerah (Muta'ali, 2015).

Rumus indeks keseimbangan pertumbuhan antar sektor dalam suatu wilayah adalah:

$$S_j = \left(\frac{1}{G_j}\right) \sqrt{\left(\frac{1}{N}\right) \sum (g_{ij} - G_j)^2}$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

S_j = Indeks keseimbangan pertumbuhan antar sektor untuk wilayah-j

G_j = Laju pertumbuhan ekonomi wilayah-j

N = Banyaknya sektor (17 Sektor)

g_{ij} = Laju pertumbuhan masing-masing sektor di wilayah j

Berdasarkan rumus tersebut dibutuhkan data PDRB (berdasarkan lapangan usaha) pada dua skala waktu yang berbeda untuk dapat dihitung laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektoral. Makin tinggi nilai S_j, makin tidak seimbang pola pertumbuhan antar sektor dalam suatu wilayah j, sebaliknya semakin kecil nilai S_j, terjadi keseimbangan pertumbuhan antar sektor dalam suatu wilayah.

2.1.9 Teori Indeks Williamson (IW)

Indek ketimpangan Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya antar wilayah dalam suatu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dan negara. Indeks Williamson pada dasarnya melihat perbandingan antar PDRB per kapita suatu wilayah dengan jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Indeks ini ditemukan oleh Jeffrey G. Williamson (1965) yang meneliti hubungan antar disparitas regional dan tingkat pembangunan ekonomi antar negara maju dan sedang berkembang (Muta'ali, 2015).

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \quad . \quad 0 < \sqrt{w} < 1$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan:

IW = Nilai indeks williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk provinsi

Nilai indeks kesenjangan Williamson antardaerah adalah 0 < IW < 1 artinya bila nilai indeks Williamson semakin besar maka semakin tinggi kesenjangan antar wilayah, dan

apabila nilai yang diperoleh mendekati nol maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau semakin mengecil. Sebagai panduan, dapat digunakan kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $0,1 < IW < 0,35$ maka tingkat ketimpangan termasuk ringan
- b. Jika $0,35 < IW < 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk sedang
- c. Jika $IW > 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk berat

2.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis, tabel kebutuhan data dan kerangka analisis yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan akhir secara sistematis dan mempermudah dalam mengolah data yang disesuaikan dengan literatur.

2.2.1 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu elemen yang memberikan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk mendukung suatu proses perencanaan yang berperan sebagai input dalam proses perencanaan yang kemudian diolah sehingga dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut yang sesuai dengan kebutuhan. Metode pengumpulan data adalah tata cara untuk memperoleh informasi dan data dalam menyusun proyek akhir ini. Data yang akan digunakan dalam proyek akhir ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah pengumpulan bahan dokumen yang tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Pengumpulan data sekunder didapatkan dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah tersusun baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Selain itu pengumpulan data sekunder juga dilakukan melalui telaah dokumen.

2.2.2 Metode Analisis

Metode analisis adalah metode yang digunakan dalam mengolah data. Metode analisis yang akan digunakan dalam laporan proyek akhir ini adalah analisis deskriptif, analisis pemerataan pembangunan, analisis pertumbuhan antar sektor, analisis tingkat ketimpangan pembangunan dan analisis spasial.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah penyajian suatu data secara ringkas, jelas, sederhana, dan terorganisasi sehingga mudah dibaca, dimengerti, dan dapat membuat kesimpulan hanya pada data-data yang telah dikumpulkan. Analisis deskriptif dalam perencanaan menggunakan data-data yang disusun pada tabel, diagram, dan grafik yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi sehingga mudah untuk dipahami.

b. Analisis Pemerataan Pembangunan

Analisis pemerataan pembangunan menggunakan Indek Pemerataan Koefisien Variasi (KV). Penggunaan koefisien variasi dalam mengukur pemerataan hasil-hasil pembangunan sangat bermanfaat. Beberapa indikator tingkat perkembangan wilayah seperti PDRB, PDDR/B/Kapita, Jumlah Penduduk, Luas lahan terbangun dan sebagainya yang dinilai koefisien variasinya dapat menggambarkan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Koefisien yang mendekati nol menunjukkan indikasi semakin meratanya pembangunan suatu wilayah berdasarkan aspek yang diamati dan demikian sebaliknya. (Muta'ali, 2015).

$$KV = \text{Stdev}/X$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

KV = Indikator pemerataan untuk setiap wilayah di Kabupaten

Stev = Standar deviasi dari indikator yang diamati, misalnya PDRB untuk setiap wilayah

X = Rata-rata nilai dari indikator yang diamati (rata-rata PDRB) untuk setiap wilayah

$$\text{Stdev} = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

xi = Nilai indikator masing-masing wilayah

x = Rata-rata nilai dari indikator

n = Jumlah wilayah

Koefisien Variasi yang mendekati nol menunjukkan indikasi semakin meratanya pembangunan suatu wilayah berdasarkan aspek yang diamati dan demikian sebaliknya.

c. Analisis Pertumbuhan Antar Sektor

Analisis pertumbuhan antar sektor menggunakan Indeks Keseimbangan Pertumbuhan Antar Sektor (Sj). Model ini digunakan untuk menganalisis masalah perbedaan pertumbuhan antar sektor terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata suatu daerah dalam periode tertentu. Sehingga, pada tahap selanjutnya akan diperoleh gambaran keseimbangan pertumbuhan pada suatu daerah. (Muta'ali, 2015)

Rumus indeks keseimbangan pertumbuhan antar sektor dalam suatu wilayah adalah:

$$S_j = \left(\frac{1}{G_j}\right) \sqrt{\left(\frac{1}{N}\right) \sum (g_{ij} - G_j)^2}$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

Sj = Indeks keseimbangan pertumbuhan antar sektor untuk wilayah-j

Gj = Laju pertumbuhan ekonomi wilayah-j

N = Banyaknya sektor (17 Sektor)

gij = Laju pertumbuhan masing-masing sektor di wilayah j

Berdasarkan rumus tersebut dibutuhkan data PDRB (berdasarkan lapangan usaha) pada dua skala waktu yang berbeda untuk dapat dihitung laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektoral. Makin tinggi nilai Sj, makin tidak seimbang pola pertumbuhan antar sektor dalam suatu wilayah j, sebaliknya semakin kecil nilai Sj, terjadi keseimbangan pertumbuhan antar sektor dalam suatu wilayah.

d. Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan

Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya antar wilayah dalam suatu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi maupun antar provinsi dan negara (Muta'ali, 2015).

$$IW = \sqrt{\frac{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \quad . \quad 0 < \sqrt{W} < 1$$

Sumber : (Muta'ali, 2015)

Keterangan :

- IW = Nilai indeks williamson
- Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota i
- Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi
- f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota i
- n = Jumlah penduduk provinsi

Nilai indeks kesenjangan Williamson antardaerah adalah $0 < IW < 1$ artinya bila nilai indeks Williamson semakin besar maka semakin tinggi kesenjangan antar wilayah, dan apabila nilai yang diperoleh mendekati nol maka indikasi terjadinya ketimpangan regional kecil atau semakin mengecil. Sebagai panduan, dapat digunakan kriteria ketimpangan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $0,1 < IW < 0,35$ maka tingkat ketimpangan termasuk ringan
- b. Jika $0,35 < IW < 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk sedang
- c. Jika $IW > 0,50$ maka tingkat ketimpangan termasuk berat

e. Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan analisis yang menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial yang hasilnya sangat bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan yang sedang dianalisis, serta memerlukan akses baik terhadap lokasi objek maupun atribut-atributnya.

Analisis spasial yang dapat digunakan dalam proyek akhir ini yaitu memetakan ketimpangan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan memetakan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan aplikasi ArcMap dari ArcGis. Data yang digunakan berupa shapefile (shp) administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dan hasil perhitungan dari analisis ketimpangan pembangunan.

2.2.3 Kebutuhan Data

Tabel kebutuhan data dalam proyek akhir ini menjadi pedoman dalam pencarian data yang disesuaikan dengan kebutuhan tujuan. Pada tabel kebutuhan data menunjukkan nama data, tujuan pencarian data, unit data yang akan dicari, jenis data, bentuk data, tahun pembuatan data, sumber, hingga alat yang digunakan untuk mendapatkan data. Tabel kebutuhan data dalam penyusunan proyek akhir dapat dilihat dalam tabel II.3.

Tabel II. 1 Tabel Kebutuhan Data

No	Variabel Data	Nama Data	Tujuan	Unit Data	Jenis Data	Bentuk Data	Metode Pengumpulan Data	Tahun	Sumber
1	Administrasi	Batas Administrasi wilayah studi	Untuk mengetahui ruang lingkup wilayah studi	Kabupaten	Sekunder	Shapefile	Telaah Dokumen Spatial	2019	BAPPEDA
2	Topografi	Kelas Kelerengan	Untuk mengetahui kondisi kelerengan wilayah studi	Kabupaten	Sekunder	Shapefile	Telaah Dokumen Spatial	2019	BAPPEDA
3	Litologi	Jenis Tanah	Untuk mengetahui kondisi jenis tanah wilayah studi	Kabupaten	Sekunder	Shapefile	Telaah Dokumen Spatial	2019	BAPPEDA
4	Penggunaan Lahan	Tata Guna Lahan	Untuk mengetahui jenis dan luas penggunaan lahan di wilayah studi	Kabupaten	Sekunder	Shapefile	Telaah Dokumen Spatial	2019	BAPPEDA
5	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Untuk mengetahui jumlah penduduk di wilayah studi	Kabupaten	Sekunder	Numerik	Telaah Dokumen	2015-2017	BPS
6	Ekonomi	PDRB	Untuk mengetahui pendapatan di wilayah studi	Kabupaten dan Provinsi	Sekunder	Numerik	Telaah Dokumen	2015-2017	BPS
		Kemiskinan	Mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan	Kabupaten dan Provinsi	Sekunder	Numerik	Telaah Dokumen	2015-2017	BPS
		PAD	Mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah	Provinsi	Sekunder	Numerik	Telaah Dokumen	2015-2017	BPS
		IPM	Mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tingkat pendidikan dan kesehatan	Provinsi	Sekunder	Numerik	Telaah Dokumen	2015-2017	BPS

Sumber : Hasil Analisis, 2019

2.2.4 Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan tahapan yang akan digunakan untuk mengolah data yang telah tersedia, dengan menggunakan alat atau metode analisis tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran.

